



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BIRO INFRASTRUKTUR DAN
SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN ANGGARAN
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	2
1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana dan Anggaran	3
1.4 Sistematika Penulisan	6
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025	7
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	10
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	11
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2026	14
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2026	15
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Efisiensi Anggaran	51
3.3 Penghargaan	52
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi	54

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.2 Rekapitulasi ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.3 Rekapitulasi ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.4 Rekapitulasi ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Kelas Jabatan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.5: Sarana dan Prasarana Penunjang pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025	5
Tabel 1.6: Rincian Belanja Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025	6
Tabel 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2025	9
Tabel 1.8 Tindak Lanjut atas Langkah Perbaikan Internal Tahun 2024	9
Tabel 2.1 Target Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026	11
Tabel 2.2 Target Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2024 – 2026	12
Tabel 2.3 Cascading Program dan Kegiatan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025	17
Tabel 2.5 Anggaran Program Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025	17
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kegiatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025	17
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025	22
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Ini	26
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Dengan Tahun Sebelumnya	29
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir 2026	33
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan	35
Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.7 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan	38
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025	52
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Kegiatan yang bersumber dari DBHCHT pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Tengah	9
Gambar 2.1 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bendungan Jragung	16
Gambar 2.2 Tampilan e-planning	18
Gambar 2.3 Tampilan e-budgeting	18
Gambar 2.4 Tampilan e-RKO	19
Gambar 2.5 Tampilan e-controlling	19
Gambar 2.6 Tampilan e-penatausahaan	19
Gambar 2.7 Tampilan SIPD	20
Gambar 2.8 Tampilan Srikandi	20
Gambar 2.9 Tampilan Spreadsheet Jadwal Kegiatan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	20
Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan	21
Gambar 3.2 Konsinyering Manajemen Risiko Lingkup Sekretariat Daerah	25
Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Jawa Tengah	40
Gambar 3.4 Sosialisasi Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2025 – 2029	44
Gambar 3.5 Penanganan Banjir Rob Pantura	49
Gambar 3.6 Dokumentasi Penganugerahan Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik Tahun 2025	53

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sebagai bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), laporan ini merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Fokus utama kami adalah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dokumen ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmen Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam mencapai kinerja organisasi yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Di sisi lain, laporan ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai sumber daya yang dimiliki, tingkat keberhasilan kinerja, identifikasi permasalahan, serta solusi strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026. Sebagai media akuntabilitas, LKjIP ini memotret efektivitas dan efisiensi kinerja Biro melalui pelaksanaan program yang berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Rencana Strategis 2024–2026 yang telah ditetapkan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Plt. Kepala Biro Perekonomian



Sarworini, SP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 196607181994012002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam merupakan salah satu biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah yang dipimpin oleh Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam diatur dalam Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam antara lain melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi antara lain:

- a) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian
- b) Pengoordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian
- d) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
- e) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian

- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam disusun berdasarkan susunan organisasi berikut:

- a) Kepala Biro
- b) Subbagian Tata Usaha Biro
- c) Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional, dengan ruang lingkup fungsi teknis yang terdiri atas:
 - 1. Infrastruktur
 - 2. Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
 - 3. Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakli Pemerintah Pusat serta pelayanan administratif. Guna melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- b) Pengoordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2 Latar Belakang

Memperhatikan kondisi eksisting dengan capaian yang diharapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar mampu melaksanakan pembangunan yang terencana dan mampu menghasilkan kinerja yang baik, berikut merupakan isu-isu strategis lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025:

- a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- b) Pengoordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun isu-isu strategis yang mendasari pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah:

- a) Pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya diversifikasi pangan
- b) Pengelolaan energi dan sumber daya alam untuk penyelamatan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- c) Percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah serta pengentasan kemiskinan

1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.3.1 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam didukung ASN dan Pegawai Non ASN per Desember 2025 sebanyak 43 orang dengan rincian ASN sebanyak 35 orang (81%) dan Pegawai Non ASN sebanyak 8 orang (19%). Ditinjau dari komposisi jabatan, ASN dengan Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 13 orang, dan Jabatan Pelaksana sebanyak 20 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah ASN terdiri dari laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. Ditinjau dari golongan, ASN Golongan IV sebanyak 8 orang, ASN Golongan III sebanyak 20 orang, ASN Golongan II sebanyak 1 orang dan PPPK sebanyak 6 orang. Rincian lebih lanjut mengenai jumlah ASN dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Gol	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
1.	IV	3	37,5%	5	62,5%	8	22,86%
2.	III	13	65%	7	35%	20	57,14%
3.	II	1	100%	0	-	1	2,86%
4.	PPPK	2	33,33%	4	66,67%	6	17,14%
Total		19	54,28%	16	45,71%	35	100,00%

Sumber: siasn.bkd.jatengprov.go.id

Selanjutnya profil ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam apabila dilihat berdasarkan pendidikan, maka proporsi yang paling banyak adalah berpendidikan pasca sarjana (S-2) sebanyak 13 orang, disusul kemudian berpendidikan sarjana (S-1) sebanyak 19 orang, berpendidikan diploma tiga (D-3) sebanyak 1 orang dan dan ASN berpendidikan SLTA sebanyak 2 orang. Rincian lebih lanjut mengenai jumlah ASN berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pend.	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
1.	S-2	5	38,46%	8	61,54%	13	37,15%
2.	S-1	12	63,16%	7	36,84%	19	54,28%
3.	D-3	0	-	1	100%	1	2,86%
4.	SLTA	2	100%	0	-	2	5,71%
Total		19	54,28%	16	45,72%	35	100%

Sumber: siasn.bkd.jatengprov.go.id

Apabila dilihat dari usia ASN, maka usia ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam paling dominan berusia 36 - 45 tahun yaitu sebanyak 12 orang (34,28%) dan disusul ASN berusia ≥ 56 tahun sebanyak 3 orang (8,57%). Secara rinci jumlah ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Rekapitulasi ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No	Usia	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
1.	≤ 35	4	44,44%	5	55,56%	9	25,71%

2.	36 – 45	6	50%	6	50%	12	34,28%
3.	45 – 55	7	63,63%	4	36,37%	11	31,44%
4.	≥ 56	2	66,67%	1	33,33%	3	8,57%
Total		19	54,28%	16	45,72%	35	100%

Sumber: siasn.bkd.jatengprov.go.id

Selanjutnya apabila dilihat dari profil kelas jabatan dan jenis kelamin ASN di lingkungan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, yang terbanyak adalah kelas jabatan 7 sebanyak 14 orang, kelas jabatan 10 sebanyak 7 orang, dan kelas jabatan 6 sebanyak 3 orang. Rincian profil kelas jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi ASN Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Kelas Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Kelas Jabatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
1.	14	0	-	1	100%	1	2,86%
2.	12	1	50%	1	50%	2	5,71%
3.	10	4	57.14%	3	42,86%	7	20%
4.	8	2	50%	2	50%	4	11,44%
5.	7	9	56,25%	7	43,75%	16	45,71%
6.	6	1	33,33%	2	66,67%	3	8,57%
7.	5	2	100%	0	-	2	5,71%
Total		19	54,28%	16	45,72%	35	100%

Sumber: siasn.bkd.jatengprov.go.id

1.3.2 Dukungan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang, berkoordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD) pada lingkup Sekretariat Daerah. Rincian aset yang berada pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam disajikan dalam Tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5: Sarana dan Prasarana Penunjang pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1.	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	268
2.	1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	12
3.	1.3.2.10	Alat Komputer	65

Sumber: Kartu Inventaris Ruangan (KIR) BMD Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

1.3.2 Dukungan Anggaran

Pagu anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025 sebesar Rp. 2.512.974.000,- (termasuk anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6: Rincian Belanja Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025

No	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
		PAD & Dana Transfer Lainnya	DBHCHT
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
A.1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
A.1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 401.074.000	
A.1.2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 40.000.000	
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
B.1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		
B.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian (diluar DBHCHT)	Rp. 364.327.000	
	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBHCHT		Rp. 1.064.270.000
B.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 330.555.000	
B.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 312.748.000	
Total		Rp. 1.448.704.000	Rp. 1.064.270.000
Grand Total		Rp. 2.512.974.000	

Sumber: Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab I memuat latar belakang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, isu-isu strategis, dukungan Sumber Daya Manusia, sarana-prasarana dan dukungan anggaran tertuang dalam DPPA Tahun 2025.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab II memuat penjelasan singkat terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja Biro, strategi dan arah kebijakan, muatan Perjanjian Kinerja pimpinan dan instrumen yang mendukung capaian kinerja.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab III memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dalam hal ini adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selain itu, pada Bab III disajikan pula penghargaan yang diterima oleh Biro pada tahun 2025.

Bab IV. Penutup

Bab IV memuat kesimpulan atas capaian kinerja organisasi dan saran masukan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan capaian kinerja

1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, nilai hasil evaluasi Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Tengah adalah 81,90 dengan kategori penilaian “A” (Memuaskan) dengan komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disertai dengan rekomendasi. Sekretariat Daerah mendapatkan interpretasi bahwa instansi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Subkoordinator. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1.	Mengimplementasikan pemberian reward dan punishment sesuai dengan kriteria penghargaan pegawai/sub unit kerja yang dimiliki	Penilaian Sub Unit/Biro telah dilakukan berdasarkan hasil kinerja tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan SK Sekda Nomor 100.3.3.4/29 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Pemberian Reward Bagi Biro Dengan Kinerja Terbaik di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	https://s.id/TL-LKjiP-ISDA-2025 Folder: Rekomendasi 1
2.	Optimalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan keselarasan capaian kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan aplikasi e-controlling kinerja	Telah dilaksanakan Desk IKI Tahun 2026 dengan Biro Organisasi pada tanggal 18 November 2025	https://s.id/TL-LKjiP-ISDA-2025 Folder: Rekomendasi 2

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Berdasarkan rekomendasi yang termuat dalam laporan LKjIP tahun 2024 dimana Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan pengendalian terhadap kinerja SKPD teknis melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-controlling sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah pada sektor infrastruktur dan sumber daya alam serta meningkatkan pelaksanaan agenda yang mampu mendukung target kinerja program dan kegiatan yang dapat mengungkit kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yakni fasilitasi Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2025 – 2029 dimana dalam penyusunan dokumen dan pelaksanaannya melibatkan K/L, Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan Akademisi. Adapun link bukti dukung dapat diakses melalui <https://s.id/TL-LKjiP-ISDA-2025> pada folder Rekomendasi LKjiP 2024.

Tabel 1.8 Tindak Lanjut atas Langkah Perbaikan Internal Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan Internal	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung	Keterangan
1.	Meningkatkan pengendalian terhadap kinerja SKPD teknis melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-controlling sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan	Memanfaatkan e-controlling sebagai pengendalian kegiatan Perangkat Daerah ampuan yang disandingkan dengan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026	https://s.id/TL-LKjiP-ISDA-2025 Folder: Rekomendasi LKjiP 2024	Selesai
2.	Meningkatkan pelaksanaan agenda yang mampu mendukung target kinerja program dan kegiatan yang dapat mengungkit kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah	Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2025 – 2029	https://s.id/TL-LKjiP-ISDA-2025 Folder: Rekomendasi LKjiP 2024	Selesai



Gambar 1.1 Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Tengah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik ditingkat internal, eksternal, regional maupun global menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk respons pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik atau *Good Governance*. Respons pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu adanya koordinasi yang tepat sasaran dalam penentuan kebijakan-kebijakan daerah yang komprehensif mulai dari perumusan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan. Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan, perlu diakomodasi dalam bentuk respons positif melalui pengaturan, pengendalian dan pengoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali dan terkoordinasi mulai dari tahapan perumusan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan akan mengakselerasi pemerintah untuk memperbaiki kinerja.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) merupakan isu utama dalam perencanaan strategis dilingkup Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yakni pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sekaligus pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam berperan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif program perekonomian dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yang nantinya akan berkontribusi pada pencapaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa, kualitas pelayanan serta manajemen risiko. Secara makro pada lingkup Sekretariat Daerah, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam berkontribusi dalam capaian tujuan yakni

dalam meningkatkan kualitas kebijakan daerah dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.1 Target Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026

Tujuan Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Indikator		
		2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Indeks Kematangan Kebijakan	36,10	37,10	38,10
<i>Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil</i>	<i>Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat</i>	90%	90%	90%
	<i>Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa</i>	90%	90%	90%
	<i>Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah</i>	80%	80%	80%
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	76	76,5	77
<i>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	82	82,5	83
<i>Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah</i>	<i>Indeks Manajemen Risiko</i>	3	3	3

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam program Biro adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan peran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
- 2) Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
- 3) Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Arah kebijakan dalam melaksanakan strategi lingkup Sekretariat Daerah secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan Sekretariat Daerah
- 2) Penguatan kapasitas ASN Biro lingkup Sekretariat Daerah
- 3) Peningkatan ketercukupan sarana dan prasarana penunjang kinerja lingkup Sekretariat Daerah
- 4) Pengembangan jejaring manajemen pembangunan daerah
- 5) Peningkatan sinergi dan efektivitas pembangunan daerah

Tabel 2.2 Target Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Tahun 2024 – 2026

PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Target		
		2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA (laporan)	12	12	12
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan (laporan)	12	12	12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA (laporan)	12	12	12
	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan (laporan)	12	12	12
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87%	87%	87%
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85%	85%	85%
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85%	85%	85%
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (dokumen)	2	2	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan	2	2	2

PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Target		
		2024	2025	2026
	Pangan (dokumen)			
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (dokumen)	2	2	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dokumen)	2	2	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (dokumen)	2	2	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (dokumen)	2	2	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (dokumen)	2	2	2
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian (laporan)	4	4	4
	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT (laporan)	2	2	2
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan (laporan)	4	4	4
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan (laporan)	4	4	4
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (laporan)	4	4	4
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM (laporan)	4	4	4
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (laporan)	4	4	4
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (laporan)	4	4	4

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Program dan Kegiatan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3 *Cascading* Program dan Kegiatan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Target Indikator
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA (laporan)	12
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan (laporan)	12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA (laporan)	12
	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan (laporan)	12
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87%
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85%
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85%
<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (dokumen)	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (dokumen)	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (dokumen)	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dokumen)	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (dokumen)	2
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan	2

PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Target Indikator
	Penataan Ruang (dokumen)	
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (dokumen)	2
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian (laporan)	4
	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT (laporan)	2
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan (laporan)	4
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan (laporan)	4
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (laporan)	4
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM (laporan)	4
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (laporan)	4
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (laporan)	4

Sumber: Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja melalui Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk hasil (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi di kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;



Gambar 2.1 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bendungan Jragung

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 untuk mewujudkan target kinerja. Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja, maka Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan program yang kegiatan didukung oleh anggaran sebesar Rp. Rp. 2.512.974.000,-

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

Tabel 2.5 Anggaran Program Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.071.900.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 441.074.000
TOTAL		Rp. 2.512.974.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kegiatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	2	Rp. 1.204.986.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	Rp. 123.639.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	Rp. 99.972.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	Rp. 165.086.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	Rp. 165.469.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	2	Rp. 162.719.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan	Dokumen	2	Rp. 150.029.000

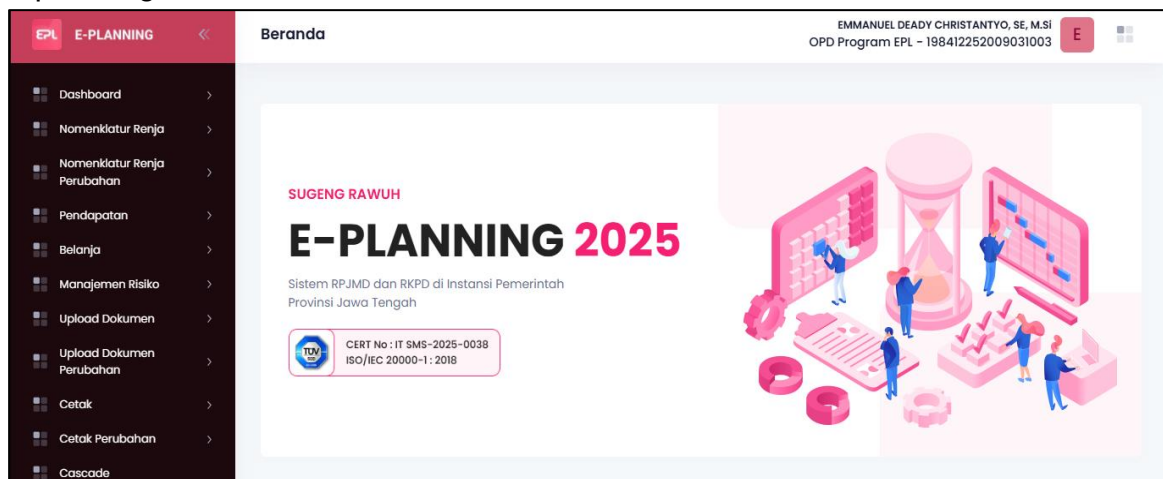
		Kawasan Permukiman			
2.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Isda	%	100	Rp. 114.034.000
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum Asisten Ekbang	%	100	Rp. 327.040.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Yang Disetarakan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

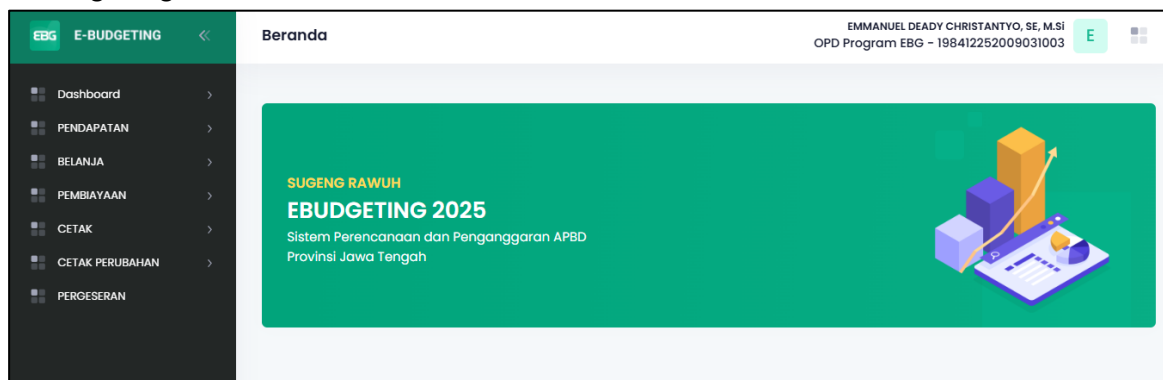
Guna mendukung capaian kinerja organisasi, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah secara aktif memanfaatkan Teknologi Informasi diantaranya *Government Resources Management System* (GRMS) antara lain sebagai berikut:

1) e-planning



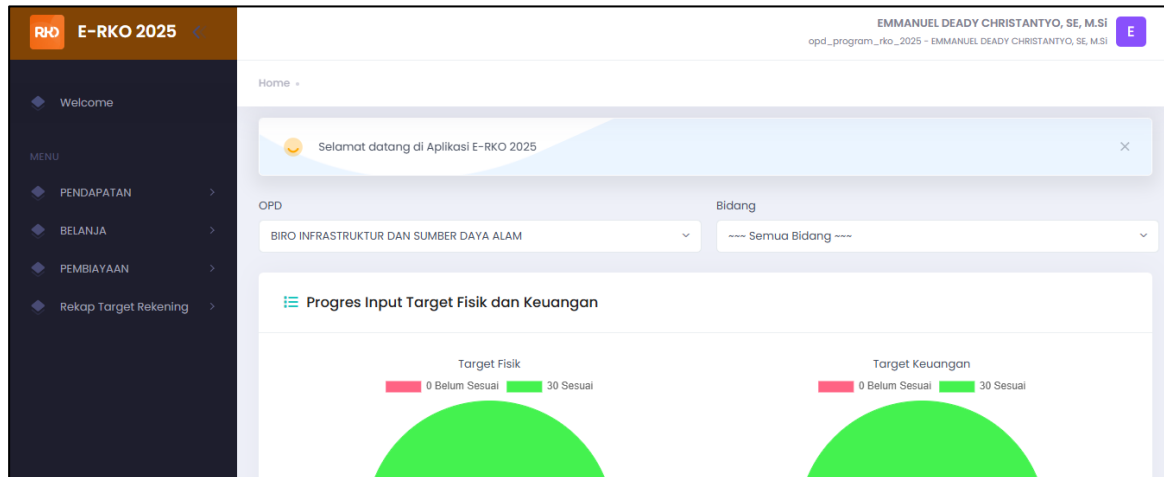
Gambar 2.2 Tampilan e-planning

2) e-budgeting



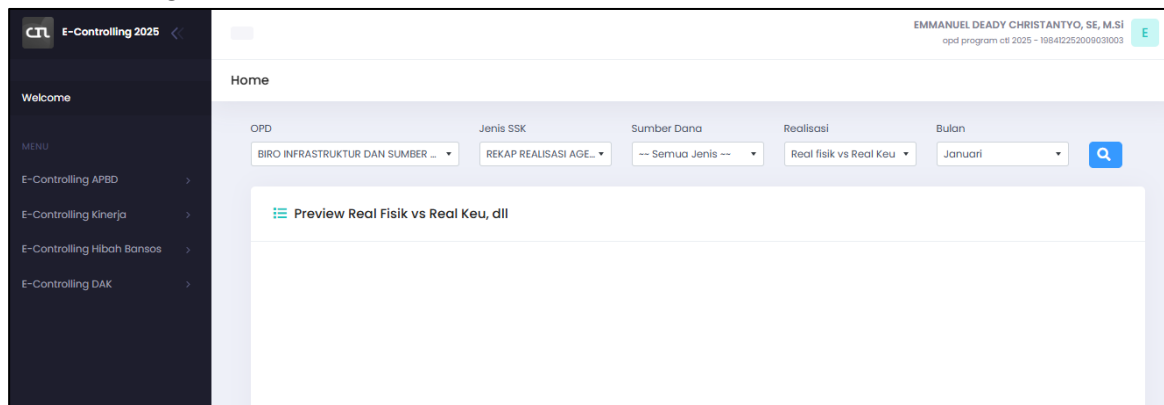
Gambar 2.3 Tampilan e-budgeting

3) e-RKO



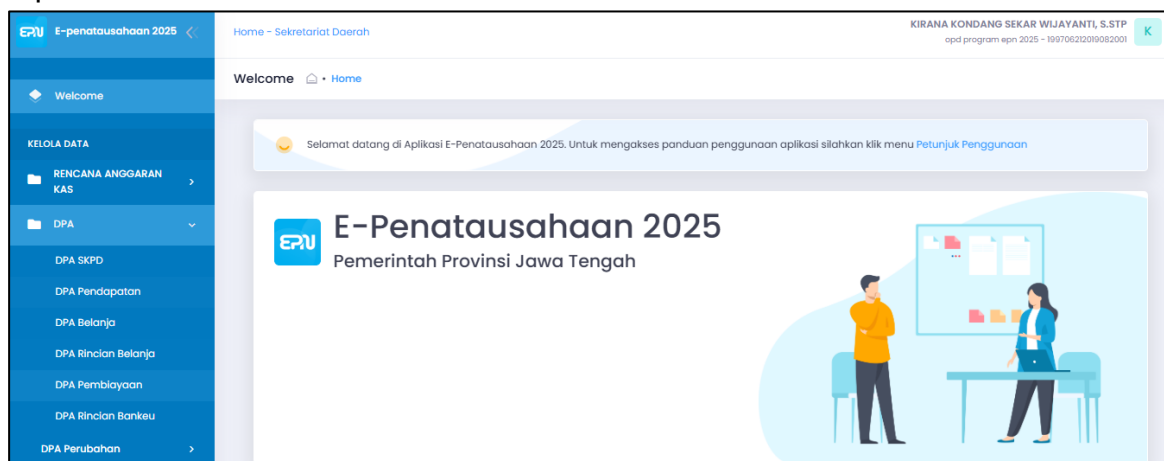
Gambar 2.4 Tampilan e-RKO

4) e-controlling



Gambar 2.5 Tampilan e-controlling

5) e-penatausahaan



Gambar 2.6 Tampilan e-penatausahaan

Selain GRMS yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat aplikasi SIPD RI yang digunakan dalam pelaksanaan program

pembangunan dan memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana serta aplikasi Srikandi untuk pengelolaan naskah dinas dan arsip.

4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM									
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1,428,597,000.00	1,428,597,000.00	1,428,597,000.00	0.00	0.00 %			
4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM									
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	330,555,000.00	330,555,000.00	330,555,000.00	0.00	0.00 %			
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	312,748,000.00	312,748,000.00	312,748,000.00	0.00	0.00 %			
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331,074,000.00	331,074,000.00	331,074,000.00	0.00	0.00 %			

Gambar 2.7 Tampilan SIPD

Pengumuman Penyesuaian Fitur Aplikasi SRIKANDI

Kami informasikan bahwa telah dilakukan penyesuaian fitur pada aplikasi, khususnya terkait proses pemberkasan dan pengelolaan naskah di Unit Pengolah.

Penyesuaian Fitur :

- Tombol "Forward Naskah Berkas" ke Unit Pengolah**
 - Tombol baru ini memungkinkan pemberkasan di lakukan oleh Unit Pengolah, dilakukan forward terlebih dahulu oleh TU/sekretaris.
- Pemindahan Tombol "Berkas"**
 - Tombol Berkas kini telah dipindahkan ke dalam menu "Pemberkasan Naskah Keluar" untuk memudahkan proses pengelompokan dan pengelolaan naskah.
- Pemberkasan Dapat Dilakukan di Unit Pengolah Masing-Masing**
 - Setiap Unit Pengolah kini dapat melakukan proses pemberkasan secara mandiri langsung dari menunya, sehingga alur kerja menjadi lebih praktis dan terstruktur.

Kami berharap penyesuaian ini dapat meningkatkan kenyamanan dan efektivitas dalam pengelolaan naskah dinas Anda.

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Gambar 2.8 Tampilan Srikandi

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam memiliki *spreadsheet* yang berguna untuk pencatatan agenda kegiatan yang dapat diakses secara *real-time* oleh pengguna akses dengan tampilan sebagai berikut:

NO	HARI/TANGGAL	ACARA/KEGIATAN	PENGIRIM		NOMOR AGENDA	KLASIFIKASI	WAKTU	TEMPAT	ACARA	DISPOSISI	YANG MENGHADIRI	CATATAN/KETERANGAN
			EKSTERNAL	INTERNAL								
7	Kamis, 2 Januari 2025	DPRD			1524	UNDANGAN	09.00	ruang rapat komisi B DPRD LI III gedung DPRD	rapat kerja komisi B DPRD prov Jawa tengah dalam rangka pembahasan persiapan pelaksanaan APBD TA 2025 bersama mitra kerja komisi B	SEMUA BAGIAN	KABIRO	siapkan bahan untuk komisi B, hadir bersama
8	Jumat, 3 Januari 2025	Kementerian Pertanian			0001	UNDANGAN	08.30	desa kalinanas, kec wonosamudra, kab boyolali	undangan pencahangan penanaman padi gogo	KPKP2	KABIRO	hadir bersama

Gambar 2.9 Tampilan Spreadsheet Jadwal Kegiatan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK)

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian program biro sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

- a. Sangat Baik : >100%
- b. Baik : 85 – 100%
- c. Cukup : 65 – 84,99%
- d. Kurang : 51 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : <50%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Berikut merupakan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2025.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Tahun 2025

No	PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir 2026
				Target	Realisasi	%	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	100	100	100%
A.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	100	100	100
A.1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	laporan	12	12	100	36

No	PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir 2026
				Target	Realisasi	%	
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	laporan	12	12	100	36
A.1.2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	laporan	12	12	100	36
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	laporan	12	12	100	36
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	92,39	106,19	87
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	95,76	112,65	85
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	96,00	112,94	85
B.1	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	dokumen	2	2	100	6
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	dokumen	2	2	100	6
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan	dokumen	2	2	100	6

No	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir 2026
				Target	Realisasi	%	
		Perikanan					
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	dokumen	2	2	100	6
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	dokumen	2	2	100	6
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dokumen	2	2	100	6
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	dokumen	2	2	100	6
B.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	laporan	4	4	100	12
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	laporan	2	2	100	6
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	laporan	4	4	100	12
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	laporan	4	4	100	12

No	PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir 2026
				Target	Realisasi	%	
B.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	laporan	4	4	100	12
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	laporan	4	4	100	12
B.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	laporan	4	4	100	12
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	laporan	4	4	100	12

Sumber: Diolah dari e-controlling Tahun 2025



Gambar 3.2 Konsinyering Manajemen Risiko Lingkup Sekretariat Daerah

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Berikut merupakan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2025.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Ini

No	PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	T	R	%	Kate- gori	Sumber Data
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100	100	100	Baik	#
A.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100	100	100	Baik	#
A.1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	12	12	100	Baik	#
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12	12	100	Baik	#
2.2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	12	12	100	Baik	#
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan	12	12	100	Baik	#

No	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	T	R	%	Kate- gori	Sumber Data
		Pembangunan					
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87	92,39	106,19	Baik	#
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85	95,76	112,65	Baik	#
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85	96,00	112,94	Baik	#
B.1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	2	2	100	Baik	#
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	2	2	100	Baik	#
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	100	Baik	#
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	100	Baik	#
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	2	2	100	Baik	#
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2	100	Baik	#
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2	100	Baik	#
B.1.1	Koordinasi,	Jumlah Koordinasi,	4	4	100	Baik	#

No	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	T	R	%	Kate- gori	Sumber Data
	Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian					
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	2	2	100	Baik	#
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	4	4	100	Baik	#
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	4	4	100	Baik	#
B.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	100	Baik	#
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	4	4	100	Baik	#
B.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	4	100	Baik	#
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	4	100	Baik	#

Ket:

T : Target, R : Realisasi, # : e-controlling GRMS

Sumber: Diolah dari e-controlling Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam realisasi capaiannya dikategorikan baik karena realisasinya mampu target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Dengan Tahun Sebelumnya

No.	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A.1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan									
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	90	90	100	87	89,01	102,31	87	92,39	106,19
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	95	95	100	85	99,30	116,82	85	95,76	112,65
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	96	96	100	85	97,33	114,51	85	96,00	112,94
B.1	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	2	2	100	2	2	100	2	2	100
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	2	2	100	2	2	100	2	2	100
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	100	2	2	100	2	2	100
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	2	100	2	2	100	2	2	100
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	2	2	100	2	2	100	2	2	100

No.	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2	100	2	2	100	2	2	100
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2	100	2	2	100	2	2	100
B.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	4	4	100	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	2	2	100	2	2	100	2	2	100
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	4	4	100	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	4	4	100	4	4	100	4	4	100
B.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	4	100	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	4	4	100	4	4	100	4	4	100

No.	PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Kebijakan ESDM									
B.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	4	100	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	4	100	4	4	100	4	4	100

Sumber: Diolah dari e-controlling Tahun 2023, 2024 dan 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam realisasi capaiannya memenuhi seluruh target sama seperti realisasi pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir 2026

No	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100%	100%	100%
A.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100%	100%	100%
A.1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	12 Laporan	36 Laporan	66,67%
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 Laporan	36 Laporan	66,67%
A.1.2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	12 Dokumen	36 Dokumen	66,67%
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 Dokumen	36 Dokumen	66,67%
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	92,39%	87%	106,19%
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	95,76%	85%	112,65%
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	96,00%	85%	112,94%

No	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
B.1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	2 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	2 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	2 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
B.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	4 Laporan	12 Laporan	66,67%
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	2 Laporan	6 Laporan	66,67%
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	4 Laporan	12 Laporan	66,67%
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	12 Laporan	66,67%
B.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Laporan	12 Laporan	66,67%

No	PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Indikator PROGRAM <i>Kegiatan</i> Sub Kegiatan	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	4 Laporan	12 Laporan	66,67%
B.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 Laporan	12 Laporan	66,67%
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	12 Laporan	66,67%

Sumber: Diolah dari e-controlling Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam realisasi capaian pada tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai target pada tahun 2026.

Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan

No	PROGRAM	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100%	100%	100	Tercapainya pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan dengan tepat waktu
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87%	92,39%	106,19	Adanya koordinasi dan sinergi antara K/L, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota yang membidangi

No	PROGRAM	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan
						urusan Pertanian
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85%	95,76%	112,65	Adanya koordinasi dan sinergi antara K/L, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85%	96,00%	112,94	Adanya koordinasi dan sinergi antara K/L, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota yang membidangi urusan Infrastruktur

Sumber: Diolah dari e-controlling Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam tahun 2025 didukung oleh terlaksananya program dan kegiatan dengan koordinasi antara K/L, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota, dimana Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam memiliki peran dalam penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan (*policy brief*) dan laporan koordinasi.

Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	PROGRAM Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100%	100%	100%	Rp. 441.074.000	Rp. 430.445.556	97,59%	2,41%
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87%	92,39%	106,19%	Rp. 1.428.597.000	Rp. 1.325.221.084	92,76%	7,24%
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85%	95,76%	112,65%	Rp. 330.555.000	Rp. 327.747.970	99,96%	0,04%
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85%	96,00%	112,94%	Rp. 312.748.000	Rp. 304.033.121	98,85%	1,15%

Sumber: Diolah dari e-penatausahaan Tahun 2025

Perhitungan efisiensi sumber daya khususnya anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwa evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program dan pencapaian keluarannya. Perhitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran dengan realisasi dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA_i \times Ci) - RA_i)}{\sum_{i=1}^n AA_i} \times 100\%$$

Keterangan: E : Efisiensi, Aai : Alokasi Anggaran Komponen I, Rai : Realisasi Anggaran Komponen i

Berdasarkan perhitungan efisiensi diatas dapat diketahui bahwa realisasi tertinggi berasal dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yakni sebesar 97,59%. Adapun yang memiliki efisiensi tertinggi adalah Program Perekonomian dan Pembangunan pada indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Program Bidang Pertanian dengan tingkat efisiensi sebesar 7,24%. Efisiensi yang cukup tinggi ini didasari dengan intensifnya penggunaan *zoom meeting* dalam melaksanakan rapat.

Tabel 3.7 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

No	PROGRAM	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan	Infikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100%	Menunjang
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	106,19%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (dokumen)	100%	Menunjang
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (dokumen)	100%	Menunjang
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (dokumen)	100%	Menunjang
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	112,65%		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dokumen)	100%	Menunjang

No	PROGRAM	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan	Infikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (dokumen)	100%	Menunjang
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	112,94%		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (dokumen)	100%	Menunjang
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (dokumen)	100%	Menunjang

Sumber: Diolah dari e-controlling Tahun 2025

Seluruh kegiatan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam mendukung dalam pencapaian indikator kinerja program melalui penyusunan dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) sebagai berikut:

A. Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah Melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Provinsi Jawa Tengah

Tercatat sebanyak 5.700 BUMDes di Jawa Tengah yang telah melakukan proses pendaftaran sebagai badan hukum di Provinsi Jawa Tengah. Angka ini mencakup sekitar 72% dari total 7.810 desa yang tersebar di 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari 5.700 BUMDes tersebut, 201 BUMDes telah diusulkan sebagai mitra SPPG. Dengan target pembentukan SPPG sebanyak 3.228 buah, BUMDes memiliki potensi sebagai pemasok bahan baku. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Penetapan BUMDes sebagai agregator utama, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menerbitkan regulasi yang mewajibkan satuan pelayanan MBG untuk menyerap minimal 60%-70% bahan baku dari BUMDes, dimana BUMDes memiliki fungsi mengumpulkan hasil panen petani lokal;
- 2) Standardisasi dan sertifikasi melalui “Rumah Pangan Desa” dengan meningkatkan fungsi BUMDes sebagai pusat sortir dan pengemasan yang memenuhi standar higiene sanitasi;
- 3) Skema pendanaan dengan pemanfaatan dana desa untuk memperkuat modal kerja BUMDes dalam membiayai pengadaan logistik MBG;
- 4) Integrasi digital melalui *dashboard* pangan jateng untuk menghubungkan data stok pangan di BUMDes dengan kebutuhan harian di titik-titik distribusi MBG



Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Jawa Tengah

B. Mengurangi *Food Waste* pada Program MBG di Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki tantangan geografis dan jumlah sekolah yang tersebar di banyak lokasi. Beberapa titik kritis penyebab food waste pada program MBG meliputi ketidaksesuaian rasa atau tekstur makanan dengan selera lokal anak-anak, porsi yang tidak fleksibel standar porsi yang disama ratakan antara siswa yang memiliki nafsu makan tinggi dan rendah serta rantai pasok yang panjang menjadikan kerusakan bahan baku sebelum dimasak. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Perencanaan menu berbasis *local taste* dan survei preferensi;
- 2) Menyusun standar menu yang tidak hanya bergizi secara makro;
- 3) Implementasi sistem *sharing table* atau meja berbagi yang menyediakan area khusus di sekolah dimana siswa dapat meletakkan komponen makanan yang belum disentuh agar dapat diambil oleh siswa lain yang masih lapar;
- 4) Digitalisasi logistik dan manajemen stok menggunakan aplikasi pencatatan kehadiran siswa secara *real-time*;
- 5) Pengolahan sisa organik di lokasi dengan alat pengolahan sampah organik

C. Penguatan Tata Niaga Telur Ayam Ras di Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam sektor peternakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Telur ayam ras merupakan sumber protein hewani murah dan mudah diakses. Meskipun produksi relatif stabil, harga telur di tingkat peternak sering berada dibawah biaya pokok produksi, terutama saat harga pakan meningkat. Di sisi lain, harga di tingkat konsumen tetap tinggi akibat inefisiensi tata niaga. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Penguatan kelembagaan peternak dengan mendorong pembentukan dan penguatan koperasi peternak telur dimana koperasi berperan sebagai agregator produksi serta pemasaran;
- 2) Digitalisasi sistem tata niaga dengan pengembangan platform informasi harga telur;
- 3) Stabilisasi harga dan penetapan harga acuan telur di tingkat peternak;
- 4) Penyediaan *cold storage* skala koperasi, fasilitasi pengemasan dan standardisasi mutu telur;

- 5) Integrasi kebijakan jagung pakan dengan produksi telur dan penguatan peran BUMD pangan dalam penyerapan telur saat harga jatuh

D. Konsep “Petani Gajian” di Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik agraris. Namun, terdapat tantangan struktural terkait kepemilikan lahan yang sangat terbatas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan kebijakan yakni “Petani Gajian” dengan membentuk kelembagaan petani berbasis kawasan serta menugaskan BUMD sektor pangan dan keuangan untuk mendampingi manajemen keuangan petani. Dalam skema ini petani, termasuk buruh tani, berperan sebagai pemilik saham atas lahan yang dikonsolidasikan dan sekaligus sebagai tenaga kerja tetap yang menerima gaji bulanan. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Kelembagaan berbentuk koperasi/BUMDes usaha tani profesional yang mengelola modal, teknologi dan pemasaran hasil panen;
- 2) Lahan garapan dapat diperoleh dari sewa lahan petani, lahan kolektif atau lahan dari pihak ketiga;
- 3) Seluruh hasil panen akan dikeola dan dijual oleh kelembagaan usaha tani profesional dengan distribusi hasil penjualan digunakan untuk gaji petani dengan skema Hari Orang Kerja (HOK), sewa lahan, modal usaha dan operasional kelembagaan, dana cadangan dan CSR

E. Fasilitasi Penguatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Melalui Koperasi Perikanan Merah Putih di Jawa Tengah

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memiliki peran vital dalam rantai pasok hasil perikanan. Namun, banyak TPI menghadapi permasalahan seperti tata kelola yang lemah, praktik pungutan liar dan kurangnya kesejahteraan nelayan. Kurangnya partisipasi aktif nelayan dalam pengelolaan TPI menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan efisiensi. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Mendorong pemerintah mengadopsi model pengelolaan TPI berbasis koperasi sebagai mitra resmi pemerintah berlandaskan regulasi daerah;
- 2) Memberikan dukungan teknis, modal awal dan pendampingan manajerial kepada Koperasi Perikanan Merah Putih;

- 3) Integrasi sistem digitalisasi lelang dan transparansi harga untuk memastikan akuntabilitas dan daya saing;
- 4) Melibatkan nelayan secara aktif dalam struktur koperasi dan pengambilan keputusan;
- 5) Membangun kemitraan strategis dengan BUMD, perbankan dan sektor logistik untuk memperkuat daya tawar koperasi

F. Pengendalian Ikan Berformalin di Jawa Tengah

Praktik penggunaan formalin (larutan formaldehida) yang tidak diperbolehkan sebagai bahan tambahan makanan masih ditemukan pada produk ikan terutama ikan asin di pasar tradisional. Hasil pengawasan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sejumlah sampel ikan asin di pasar tradisional mengandung formalin dengan konsentrasi yang membahayakan kesehatan. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Penguatan pengawasan/inspeksi di pasar tradisional, tempat kulakan dan distribusi ikan menggunakan *rapid test kit* dan uji laboratorium (jika dibutuhkan) serta penegakan sanksi tegas;
- 2) Kampanye kesadaran konsumen tentang ciri-ciri ikan yang mengandung formalin dan bahaya terhadap kesehatan serta pembinaan kepada pedagang mengenai penanganan ikan yang benar;
- 3) Memperkuat koordinasi antar pihak terkait;
- 4) Menyediakan alat deteksi dan pengembangan sistem pelaporan

G. Penyusunan Roadmap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Berbasis Ekosistem Mangrove di Jawa Tengah

Masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir dengan sumber pendapatan sangat bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitar pesisir dan laut. Pengelolaan wilayah pesisir seringkali menghadapi berbagai ancaman, baik dari aspek lingkungan seperti degradasi lingkungan, pencemaran, kerusakan ekosistem dan *overfishing*. Kondisi dan karakteristik kawasan pesisir ini menjadi tantangan bagi masyarakat dan

pemerintah daerah untuk mengelola secara bijak dalam rangka pembangunan nasional. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Penguatan kelembagaan nelayan;
- 2) Memberikan alternatif pengembangan mata pencaharian dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan perikanan tangkap;
- 3) Mempermudah pemberian akses permodalan bagi nelayan;
- 4) Penyusunan peta jalan pemberdayaan masyarakat yang dibagi dalam 3 fase, yakni jangka pendek (dengan pembangunan pondasi kelembagaan, modal, kapasitas, jejaring pasar dan teknologi), jangka sedang (dengan pendampingan usaha yang lebih spesifik, monitoring dan evaluasi penerimaan hibah dan validasi model bisnis unggulan) dan jangka panjang (dengan pengembangan UMKM dan replikasi model bisnis)



Gambar 3.4 Sosialisasi Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2025 – 2029

H. Penguatan Dukungan Lintas Sektor dalam Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Tengah

Perhutanan Sosial merupakan salah satu instrumen strategis pembangunan kehutanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pemulihan dan perlindungan ekosistem hutan. Perhutanan Sosial menjadi salah satu riang strategis untuk mengkoordinasikan pengelolaan kawasan hutan dengan

pengelolaan khusus, mendorong pemulihan lahan kritis dan memastikan keberlanjutan fungsi lindung dan produksi hutan melalui keterlibatan masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Penguatan peran koordinatif dalam mengorkestrasi dukungan lintas sektor untuk Perhutanan Sosial;
- 2) Integrasi dukungan prapanen, panen dan pasca panen ke dalam program perangkat daerah;
- 3) Mendorong keterlibatan dunia usaha dan CSR dalam penyediaan bibit produktif dan konservasi untuk pemulihan lahan kritis;
- 4) Penguatan perlindungan hutan melalui dukungan pengamanan kawasan, termasuk kebutuhan personel dan sarana pengawasan sesuai kewenangan;
- 5) Penetapan dokumen komitmen dukungan lintas sektor sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi kelompok kerja;
- 6) Mendorong peran desa dan UMKM agar dapat mengoptimalkan potensi pengelolaan hasil hutan;
- 7) Memaksimalkan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8) Sinkronisasi kegiatan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral

I. Kebijakan Energi Menuju Provinsi Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan Mendukung Indonesia Emas 2045

Dalam rangka menjawab tantangan ketahanan energi nasional yang dinamis dan mempercepat transisi menuju energi bersih, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sebagai ujung tombak implementasi dengan melibatkan masyarakat memanfaatkan potensi sumber energi lokal di wilayah masing-masing seperti dengan program Desa Mandiri Energi, pemasangan PLTS di Kepulauan Karimunjawa, penggunaan pompa air dengan tenaga surya untuk keperluan air bersih dan pertanian, pengolahan sampah sebagai sumber energi dan gerakan hemat energi. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Diperlukan kerjasama dan dukung dari pemerintah kabupaten/kota serta kolaborasi akademisi untuk implementasinya dan pengurangan emisi karbon dalam mendukung kemandirian energi di Jawa Tengah;

- 2) Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran dengan fasilitasi energi baru terbarukan, pemanfaatan listrik elektrifikasi dan gasifikasi, mendorong kinerja desa mandiri energi dan mendukung konservasi energi;
- 3) Mengkomunikasikan kendala dalam penerapan kebijakan energi;
- 4) Menyelaraskan kebijakan sektor energi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

J. Menggali Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah Menuju Ketahanan Energi Nasional

Pemanfaatan energi di Jawa Tengah masih menggunakan sumber energi dari bahan bakar fosil. Jawa Tengah masih mempunyai potensi EBT yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yang perlu dioptimalkan diantaranya potensi tenaga surya, angin dan mikrohidro. Dalam pelaksanaannya pengembangan EBT terkendala dalam kebijakan tata ruang dan tata wilayah, pengadaan tanah, produktivitas dengan hasil *return* yang bervariasi dan tidak optimalnya desain proyek. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Perlu dilakukan simulasi desain dan layout PLTS dengan simulasi performa dan kombinasi komponen-komponennya;
- 2) Perlu melakukan *micrositing*, *wind resource assessment* dan simulasi array turbin angin untuk pengembangan PLTB;
- 3) Perlu melakukan pengambilan data hidrologis dan studi lapangan uji geoteknikal untuk mengembangkan PLTMikrohidro;
- 4) Mengeksekusi *interconnection cost* dengan mempertimbangkan *financing cost* untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan dan reimburse oleh *oftaker*/PLN;
- 5) Melakukan sinkronisasi dengan RTRW dan RDTR untuk mengalokasikan keperluan infrastruktur energi;
- 6) Melakukan penyesuaian aspek finansial untuk mengejar *return* yang tinggi atau harga jual.

K. Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah

Urbanisasi dan kebutuhan infrastruktur sangat mengurangi ketersediaan lahan pertanian karena lahan produktif di pinggiran kota dialihfungsikan menjadi perumahan, jalan, pabrik dan fasilitas perkotaan lainnya yang menyebabkan

penurunan produksi pangan domestik, meningkatnya ketergantungan pada impor, meningkatnya potensi kerawanan pangan dan degradasi lingkungan. Program Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol, sekolah rakyat dan koperasi desa/kelurahan merah putih memang menghadapi tantangan penggunaan lahan terutama di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena pembangunan infrastruktur untuk program strategis nasional ini sering kali tidak sesuai alih fungsi lahan yang memerlukan kajian khusus dan lahan pengganti serta menimbulkan potensi konflik hukum. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Harmonisasi perencanaan berupa sinkronisasi RTRW dengan RTR LP2B untuk menghindari tumpang tindih lokasi PSN dan LP2B sejak awal dengan memastikan data LP2B/LSD sinkron dengan RTRW kabupaten/kota;
- 2) Insentif pengelolaan LP2B dengan memberikan insentif fiskal atau non-fiskal bagi pemilik lahan yang mempertahankan LP2B (dengan subsidi atau kemudahan akses kredit);
- 3) Mekanisme kompensasi berupa mewajibkan pengembang PSN untuk menyediakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan kualitas setara atau lebih baik sesuai PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B yang menetapkan mekanisme pendanaan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar tetap produktif, mengatur sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga lembaga lain serta kegiatan yang dibiayai seperti pencegahan alih fungsi lahan;
- 4) Penguatan kelembagaan dengan memperkuat peran dinas pertanian dan kantor ATR/BPN setempat dalam mengawasi dan memverifikasi LP2B dengan mendorong pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) atau LP2B vertikal di wilayah non pertanian untuk mengurangi tekanan pada LP2B eksisting;
- 5) Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) dengan menetapkan zona khusus pertanian yang dilindungi alih fungsi sekaligus menjadi pusat produksi pangan utama dengan mendorong hilirsasi dan agribisnis berupa pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di sekitar wilayah pertanian;
- 6) Sinergitas kebijakan dimana pemerintah daerah dan pusat harus menyelaraskan kebijakan, mendorong investasi industri yang tidak bersaing langsung dengan lahan pangan (berupa industri pengolahan bukan pabrik semen di lahan sawah);
- 7) Insentif petani berupa dukungan teknis, modal serta jaminan pasar bagi petani agar tetap mau bertani dan menghasilkan pangan berkualitas tinggi dengan

penerapan teknologi dan teknis irigasi modern untuk meningkatkan produktivitas di lahan yang ada dan memaksimalkan hasil tanpa ekspansi lahan;

- 8) Penegakan hukum tegas dengan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar alih fungsi lahan, bukan hanya sekadar aturan;
- 9) Kepastian hukum bagi petani, khususnya dalam penetapan LSD diharapkan memberikan ketenangan bagi petani untuk merencanakan pengelolaan lahan jangka panjang.

L. Pengelolaan Pesisir dalam Penanganan Banjir Pantura Jawa Tengah

Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah merupakan kawasan yang rawan terhadap berbagai bencana yang diakibatkan oleh alam maupun aktivitas manusia. Tingginya pembangunan di kawasan ini telah menyebabkan kawasan ini mengalami overeksploitasi Sumber Daya Alam seperti lahan terbuka hijau, air bersih, bahan tambang yang dibutuhkan manusia. Pengelolaan pesisir yang tepat harus mempertimbangkan proses pantai berdasarkan kondisi lingkungan pesisir tersebut. Karakteristik pantai dan proses terkait yang terlibat seperti aspek geomorfologi, hidrooseanografi, suplai sedimen, penggunaan lahan, estetika dan lingkungan sangat penting dalam rangka menentukan strategi rehabilitasi pantai yang akan diimplementasikan. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Penanganan terpadu yang efektif memerlukan pendekatan dari hulu ke hilir. Pada kawasan hulu berupa rehabilitasi DAS, reboisasi, pengelolaan lahan yang baik dan pembangunan infrastruktur pencegah erosi. Pada kawasan hilir berupa penguatan infrastruktur pesisir (pompa, tanggul), pembersihan saluran air, penataan ruang untuk mencegah pembangunan di area rawan;
- 2) Solusi lintas sektor dan wilayah dengan koordinasi antar daerah dan lintas sektor untuk membangun infrastruktur fisik seperti tanggul, normalisasi sungai dan sistem drainase yang memadai. Sektor swasta dan masyarakat berperan aktif dalam pencegahan, mitigasi dan pemulihan termasuk partisipasi dalam program pengurangan risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi dimana dalam penanganannya tidak bisa hanya satu arah tapi mencakup infrastruktur struktural (tanggul dan pompa air) dan infrastruktur non struktural (edukasi dan tata ruang) untuk mengatasi akar masalah dan dampak jangka panjang;



Gambar 3.5 Penanganan Banjir Rob Pantura

- 3) Solusi struktural dengan pembangunan tanggul laut, bendungan dan polder, rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir, peningkatan dan pembersihan drainase serta kanal;
- 4) Solusi nonstruktural dengan manajemen ekosistem (revitalisasi mangrove, penanaman pohon di hulu dan pembangunan bukti pasir), sistem peringatan dini (berupa pengembangan dan operasionalisasi peringatan dini banjir dan rob), penataan ruang dengan melakukan pembatasan pembangunan di bantaran sungai dan zona rentan serta penataan ulang kawasan pesisir, dan edukasi serta peningkatan partisipasi kesadaran masyarakat dan pelibatan komunitas lokal;
- 5) Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan provinsi/kabupaten/kota;
- 6) Pengembangan masterplan pengelolaan banjir Pantura yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir;
- 7) Pendekatan adaptasi perubahan iklim dengan mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan pesisir dalam rangka penanganan banjir;
- 8) Kerjasama multi sektor dengan melibatkan akademisi, dunia usaha, LSM dan masyarakat sipil dalam perumusan dan implementasi kebijakan;

M. Kebijakan Penanganan Perumahan Layak Huni (dengan Studi Penataan Kawasan Permukiman Pesisir Utara)

Selain ancaman rob dan kondisi kumuh, kawasan pesisir kini menghadapi masalah yang semakin kompleks. Hilangnya lahan pertanian dan terganggunya tambah masyarakat telah menurunkan produktivitas ekonomi, diperparah oleh berhentinya aktivitas industri menengah dan besar serta usaha turunannya di koridor-koridor utama dekat permukiman. Kondisi ini berdampak signifikan di wilayah Kab. Demak seperti Sayung, Wonokerto, dan Siwalan yang selama ini bergantung pada sektor primer. Disaat yang sama, fungsi tanggul, pompa dan drainase belum optimal sehingga genangan dari rob maupun hujan sering bertahan lama dan mengganggu aktivitas harian. Keterbatasan sarana-prasarana permukiman terutama air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan memicu berkembangnya permukiman kumuh dan tidak layak huni. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai;
- 2) Membangun 1000 desa/kampung wisata baru;
- 3) Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada pesisir utara dan selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah;
- 4) Pembangunan rumah apung kawasan pesisir;
- 5) Pembangunan Giant Sea Wall tanggul alut untuk mencegah abrasi banjir rob dan sedimentasi tanah;
- 6) Monitoring dan sistem peringatan bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
- 7) Penataan drainase dan pengendalian banjir.

N. Optimalisasi Peran Tenaga Fasilitator Lapangan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PKRTLH) di Jawa Tengah

Berdasarkan data backlog kelayakan di Provinsi Jawa Tengah beserta penanganan sampai dengan tahun 2024, masih terdapat sisa backlog kelayakan yaitu sebesar 1.022.113 unit yang terdisir tas 502.647 unit dari sisa data PBDT-2015 dan 519.466 unit sisa dari data DTKS. Penanganan sisa backlog kelayakan direncanakan dilaksanakan secara bertahap selama 20 tahun kedepan. Salah satu

dukungan untuk keberhasilan program tersebut adalah ketersediaan tenaga fasilitator lapangan yang mendampingi penerima bantuan dari awal hingga akhir pelaksanaan program termasuk teknis konstruksi dan pelaporan. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah:

- 1) Bankeupemdes PK RTLH Tahun 2025, target 17.000 penerima di 2.574 desa yang tersebar di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Jumlah personil Tenaga Fasilitator Lapangan sebanyak 29 orang atau masing-masing 1 personil di 29 kabupaten dan 2.574 desa. Jumlah Tenaga Fasilitator Lapangan ini tentunya tidak sepadan dengan jumlah RTLH dan jumlah sebaran desa. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan jumlah Tenaga Fasilitator Lapangan yang proporsional dengan jumlah penerima dan jumlah desa agar pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2) Tenaga Fasilitator Lapangan memiliki pengetahuan yang baik terkait bangunan rumah baik cara membangunnya maupun cara merawat bangunan rumah serta mitigasi bencana apabila rumah terdampak bencana;
- 3) Bagi daerah yang melakukan intervensi PKRTLH, untuk memudahkan koordinasi dan konsultasi agar dibuat grup komunitas di media sosial pada tiap kecamatan atau minimal grup komunikasi pada level desa bagi perangkat desa, penerima manfaat dan yang terkait dengan RTLH;
- 4) Program PKRTLH tidak semata-mata kuantitas yang telah intervensi, namun kualitas bangunan hasil intervensi juga seharusnya menjadi fokus utama. Bankeupemdes sebesar Rp. 20.000.000 adalah pemicu bagi penerima manfaat untuk memperbaiki rumah agar layak huni ditambah dengan swadaya penerima manfaat untuk memperoleh bangunan yang berkualitas sesuai dengan kaidah rumah sehat. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi penerima manfaat dalam pemilihan bahan material dan pengawasan pelaksanaan PKRTLH.

3.2 Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi dengan anggaran pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025

No	PROGRAM Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 441.074.000	Rp. 430.445.556	97,59%
A.1	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp. 441.074.000	Rp. 430.445.556	97,59%
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.071.900.000	Rp. 1.957.002.175	94,45%
B.1.	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	Rp. 2.071.900.000	Rp. 1.957.002.175	94,45%
Total		Rp. 2.512.974.000	Rp. 2.387.447.731	95,00%

Sumber: Diolah dari e-controlling Tahun 2025

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Kegiatan yang bersumber dari DBHCHT pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025

No	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 1.064.270.000	Rp. 972.771.404	91,40%
B.1.	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	Rp. 1.064.270.000	Rp. 972.771.404	91,40%
B.1.1	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBHCHT	Rp. 1.064.270.000	Rp. 972.771.404	91,40%

Sumber: Diolah dari e-controlling Tahun 2025

3.3 Penghargaan

Biro Infrastruktur dan SDA mendapatkan Peringkat 3 pada Kategori Biro lingkup Sekretariat Daerah dengan Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) terbaik pada tahun 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah kepada Ibu Kepala Biro Infrastruktur dan SDA dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Business Matching Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Rabu - Kamis, 3 - 4 Desember 2025 di Semarang. Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam mewujudkan upaya *Good Governance* lingkup Sekretariat Daerah.



Gambar 3.6 Dokumentasi Penganugerahan Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, persentase realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 95,00% serta realisasi keuangan yang bersumber dari DBHCHT sebesar 91,40%. Realisasi fisik pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebesar 100%. Tingkat capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 100%. Biro infrastruktur dan Sumber Daya Alam memiliki capaian kinerja dengan nilai sangat baik dimana ketiga capaian program diatas 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,00%.

4.2 Rekomendasi

Dengan penyampaian laporan kinerja yang memuat capaian realisasi indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2025 ini, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam memiliki peran aktif dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bagi stakeholder terkait. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas bersama Perangkat Daerah ampunan tidak hanya berasal dari pencapaian realisasi keuangan dan realisasi fisik saja, namun memperluas muatan koordinasi dan kerjasama terkait ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan juga ketercapaian indikator program dari Perangkat Daerah ampunan sebagai upaya penguatan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian. Diperlukan suatu rencana tindak lanjut berupa penyusunan standar operasional dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan maupun monitoring pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dari rekomendasi kebijakan yang diberikan.